



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

VAKSINASI TERNAK UNTUK PENANGGULANGAN WABAH PMK

Masyithah Aulia Adhiem
Analisis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Indonesia telah menjangkit hingga ke 131 kabupaten/kota di 13 provinsi. Data per 1 Februari 2025 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mencatatkan sebanyak 30.376 hewan ternak telah terjangkit wabah ini, dengan jumlah kematian sebanyak 863 ekor dan potong paksa sebanyak 390 ekor. Berbagai kebijakan pengendalian wabah ini telah diterapkan, salah satunya adalah vaksinasi ternak. Pemberian vaksin pada hewan ternak yang sehat mampu memperkecil peluang terjangkit wabah PMK dan membantu memutus rantai penularan.

Pemerintah menyiapkan 4 juta dosis vaksin untuk menangani wabah PMK dan akan diberikan secara bertahap ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Jenis vaksin PMK yang disediakan oleh Kementan yaitu Vaksin PMK Kementan, Aftovaks-E, Bioaftogen, Decivac AMD FOE, dan Aphthovet PMK. Terhitung sejak 28 Desember 2024 hingga 1 Februari 2025, Kementan telah menyebarkan 276.148 dosis vaksin di berbagai wilayah, baik daerah yang terjangkit maupun daerah yang tidak terjangkit (*zero case*), sebagai bentuk upayaantisipasi lonjakan kasus. Distribusi vaksin yang sudah dilakukan harus terus diawasi dan dievaluasi karena wabah PMK dikhawatirkan masih akan terus terjadi selama beberapa pekan ke depan.

Penyebaran vaksin pada tahap pertama telah dilakukan di awal tahun 2025. Namun, beberapa daerah sudah mulai melaporkan stok yang menipis dan dikhawatirkan belum dapat menahan laju penularan secara optimal. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) telah menerima 4.000 dosis vaksin pada tahap awal. Hingga akhir Januari 2025 lalu, sebanyak 79,3 persen dosis vaksin sudah diberikan kepada hewan ternak di berbagai lokasi, yaitu Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Stok yang makin menipis menimbulkan kekhawatiran karena jumlah ternak yang berisiko tertular masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 30.185 ekor. Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Barat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinas PKH) Provinsi Sumatera Barat melaporkan bahwa jumlah vaksin yang disiapkan masih belum optimal. Alokasi awal dari pemerintah pusat adalah sebanyak 58.000 dosis vaksin yang akan diberikan secara bertahap untuk populasi ternak sebanyak sekitar 400.000 ekor. Jumlah tersebut masih belum ideal karena diperkirakan hanya mencakup 5 persen dari total populasi. Padahal jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai kekebalan kelompok adalah sebanyak 70 persen vaksinasi. Beberapa wilayah bahkan sudah mulai mengalami kekosongan stok, seperti di Kediri, Jawa Timur. Pada tahap awal, Kediri sudah mendapatkan 7.050 dosis vaksin dan sudah dibagikan dalam program vaksinasi massal. Kekosongan stok yang terjadi dapat menimbulkan risiko terjadinya peningkatan kasus. Saat ini kondisi wabah di Kediri sudah melandai, tetapi masih banyak terjadi kematian ternak.

Guna mempertahankan efektivitas program vaksinasi PMK maka pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok dan pemerataan distribusi, terutama daerah yang memiliki banyak kasus PMK. Jangan sampai kekosongan stok meningkatkan risiko penularan wabah di daerah tersebut. Terlebih lagi

dengan kondisi cuaca ekstrem saat ini yang dapat menurunkan imunitas hewan ternak dan meningkatkan risiko penyebaran wabah. *Kedua*, pemerintah perlu secara aktif memberikan edukasi kepada peternak mengenai pentingnya vaksinasi untuk memutus rantai penularan wabah. Selain itu, juga dapat dibarengi dengan edukasi mengenai upaya pencegahan lainnya seperti meningkatkan kebersihan kandang, melakukan vaksinasi secara mandiri, dan melaporkan kesehatan ternak secara berkala kepada dinas terkait. *Ketiga*, pemerintah perlu memperhitungkan kembali jumlah vaksin yang dibutuhkan secara nasional untuk memastikan bahwa cakupan vaksinasi dapat membantu tercapainya kekebalan kelompok terhadap wabah sehingga mampu mencegah terjadinya hal ini di masa mendatang. *Keempat*, terus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta untuk menangani wabah PMK. Hal ini terutama terkait pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan ternak. Hewan ternak yang didistribusikan harus dipastikan sehat dan sudah mendapatkan vaksin PMK.

Atensi DPR

Wabah PMK kembali merebak di Indonesia dan menimbulkan banyak kematian hewan ternak. Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi wabah tersebut adalah melalui vaksinasi PMK. Penanganan PMK melalui program vaksinasi perlu menjadi perhatian bagi DPR RI, khususnya Komisi IV. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat memastikan kecukupan stok vaksin nasional serta pemerataan distribusinya. Selain itu, juga dapat mendorong mitra kerja terkait untuk memberikan dukungan bagi peternak yang terdampak serta insentif bagi peternak yang secara aktif turut serta dalam program vaksinasi. Sinergi antarpemangku kepentingan juga perlu didorong untuk memastikan wabah dapat dikendalikan dan mencegah terjadinya wabah di masa mendatang. Melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI dapat memastikan Kementan memiliki kecukupan anggaran untuk penyediaan dan distribusi vaksin.

Sumber

cnbcindonesia.com, 31 Januari 2025;
ditjenpkh.pertanian.go.id, 8, 31 Januari, dan 1 Februari 2025;
kompas.com, 1 Februari 2025;
kompas.id, 31 Januari 2025;
mediaindonesia.com, 1 dan 2 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*